

**REPRESENTASI KEBUDAYAAN PADA PEMBERITAAN PEMBENTUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DI MEDIA KOMPAS: STUDI *CULTURAL
CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS***

*(Cultural Representation in the News of the Formation of the Ministry of Culture
in Kompas Media: Cultural Critical Discourse Analysis Study)*

Sakinah Fitri*, Sultan

Program Doktor Pendidikan Bahasa, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar,
Jl. Bonto Langkasa No. 15, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Pos-el: sakinahfitri@unm.ac.id, sultan@unm.ac.id

Naskah Diterima Tanggal 28 Desember 2024; Direvisi Akhir Tanggal 3 Juni 2025;

Disetujui Tanggal 22 Juni 2025

DOI: <https://doi.org/10.26499/sawer.v31i1.1461>

Abstract

Culture uses a cultural approach in Cultural Critical Discourse Analysis (CCDA) by Gavriely & Nuri, which includes normalization and alienation strategies. This qualitative descriptive study uses data in the form of news texts, statements by public figures, and policy discourses obtained from digital media. Data collection techniques use documentation and observation techniques of library studies. Data analysis uses triangulation techniques of sources, methods, and experts. The results of the analysis show that the normalization strategy is carried out by naturalizing the need to form a ministry, historical-based justification, and strengthening national symbols. On the other hand, the alienation strategy is found through framing political conflicts, blurring the focus of policies, and creating exclusivity narratives. These findings reveal that the narrative of the formation of the Ministry of Culture reflects the complexity of politics and culture in the construction of national identity, while also showing the important role of the media in shaping public opinion. This study contributes to a critical understanding of the relationship between media, public policy, and cultural representation, and offers important insights for creating a more inclusive and culturally just discourse.

Keywords: *cultural critical discourse analysis, normalization strategy, alienation strategy, public discourse, cultural representation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi wacana publik pembentukan Kementerian Kebudayaan menggunakan pendekatan budaya dalam *Cultural Critical Discourse Analysis* (CCDA) oleh Gavriely & Nuri, yang mencakup strategi normalisasi dan keterasingan. Studi deskriptif kualitatif ini menggunakan data berupa teks berita, pernyataan tokoh publik, dan diskursus kebijakan yang diperoleh dari media digital. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan observasi studi pustaka. Analisis data menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan pakar. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi normalisasi dilakukan dengan naturalisasi kebutuhan pembentukan kementerian, justifikasi berbasis historis, dan penguatan simbol nasional. Di sisi lain, strategi keterasingan ditemukan melalui framing konflik politik, pengaburan fokus kebijakan, dan penciptaan narasi eksklusivitas. Temuan ini mengungkap bahwa narasi pembentukan Kementerian Kebudayaan mencerminkan kompleksitas politik dan budaya dalam konstruksi identitas nasional, sekaligus

memperlihatkan peran penting media dalam pembentukan opini publik. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman kritis tentang relasi antara media, kebijakan publik, dan representasi budaya, serta menawarkan wawasan penting untuk menciptakan diskursus yang lebih inklusif dan berkeadilan budaya.

Kata-kata kunci: *cultural critical discourse analysis*, strategi normalisasi, strategi keterasingan, wacana publik, representasi budaya.

PENDAHULUAN

Isu pemisahan Kementerian Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Indonesia menjadi wacana yang kerap mencuri perhatian publik. Wacana ini mencerminkan semakin besarnya urgensi untuk memberikan perhatian yang lebih fokus terhadap pelestarian, pengembangan, dan promosi budaya nasional di tengah kompleksitas globalisasi. Berbagai pandangan muncul mengenai manfaat maupun tantangan dari kebijakan tersebut (Fisip, 2024).

Wacana pemisahan Kementerian Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan di Indonesia menjadi isu yang mencerminkan adanya kebutuhan untuk memperkuat perhatian pemerintah terhadap pengelolaan kebudayaan nasional di tengah derasnya arus globalisasi. Sebagai negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, Indonesia dihadapkan pada tantangan pelestarian identitas budaya sekaligus adaptasi terhadap modernitas (Setyowati, 2024).

Selain itu, kebijakan ini mencuat di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan perhatian terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan di tanah air. Di sisi lain, kebijakan ini juga menuai pro dan kontra di kalangan publik, dengan berbagai pandangan yang beragam mengenai dampaknya terhadap struktur pemerintahan dan efektivitas program kebudayaan. Hal ini menuntut sebuah analisis mendalam mengenai tentang wacana kebijakan ini dipresentasikan kepada publik melalui media, yang berperan sebagai saluran utama pembentukan opini masyarakat (Setyowati, 2024).

Kebudayaan memainkan peran vital dalam pembentukan identitas nasional dan pembangunan bangsa (Anwar, 2024). Di Indonesia, upaya pemajuan kebudayaan telah

diatur dalam berbagai regulasi, termasuk UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan nasional. Pemberitaan media dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal pembentukan Kementerian Kebudayaan. Analisis terhadap representasi kebudayaan dalam wacana media menjadi penting untuk memahami media membingkai isu-isu kebudayaan dan implikasinya terhadap opini publik. Media massa, sebagai sumber utama informasi bagi masyarakat, memiliki kekuatan untuk mengarahkan narasi tertentu, membingkai suatu kebijakan, dan menentukan cara sebuah isu disorot.

Analisis wacana kritis menawarkan pendekatan yang relevan untuk memahami kebijakan-kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan kebudayaan, diproduksi, dikonstruksi, dan diterima dalam diskursus sosial. Salah satu pendekatan yang sangat efektif dalam hal ini adalah *Cultural critical discourse analysis* (CCDA). Pendekatan *Cultural critical discourse analysis* (CCDA) yang dikembangkan oleh Gavriely & Nuri menawarkan kerangka analisis yang relevan untuk mengkaji representasi kebudayaan dalam wacana publik. Pendekatan ini menitikberatkan pada dua strategi utama, yaitu normalisasi dan keterasingan.

Konteks wacana pemisahan Kementerian Kebudayaan, kedua strategi ini digunakan untuk membangun narasi yang mendukung atau menolak kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi wacana tersebut dalam media massa Indonesia dengan pendekatan CCDA, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami

dinamika kekuasaan, ideologi, dan representasi budaya dalam kebijakan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metafora media massa Indonesia merepresentasikan wacana pemisahan Kementerian Kebudayaan menggunakan pendekatan *Cultural Critical Discourse Analysis* dengan fokus pada dua strategi tersebut: normalisasi dan keterasingan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks-teks berita yang memuat informasi mengenai kebijakan pemisahan kementerian, baik dari media mainstream maupun media sosial. Melalui analisis wacana kritis, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi representasi budaya dibentuk dan kekuasaan, ideologi, serta hubungan sosial memainkan peran dalam penggambaran kebijakan tersebut.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran media dalam membentuk opini publik tentang kebijakan kebudayaan, serta memberikan gambaran mengenai strategi komunikasi yang digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam mempengaruhi persepsi masyarakat.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran media dalam membentuk dan menyebarluaskan narasi kebijakan kebudayaan kepada masyarakat. Secara praktis, temuan ini dapat digunakan oleh guru dalam membekali siswa dengan literasi media dan kesadaran kritis terhadap wacana kebijakan. Bagi pembuat kebijakan dan pengembang kurikulum, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk menyusun strategi komunikasi publik yang lebih inklusif dan demokratis.

Penelitian relevan mengenai representasi ideologi kultural dalam metafora di media pemberitaan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Penelitian oleh Zainuddin, Darwis & Iswary (2021) tentang mengungkap representasi ideologi melalui media massa berita wacana publik pemindahan ibu kota negara di dalam media Kompas menghasilkan temuan bahwa ideologi terungkap dari metafora dan ujaran yang disampaikan.

Selanjutnya, penelitian Purwanto (2022) yang membahas tentang kebijakan kebudayaan negara menghasilkan temuan bahwa melalui pemberitaan kebijakan pemerintahan bukan hanya untuk kepentingan negara tetapi juga menjaga kepercayaan warga negara terhadap program pemerintah. Kuatnya peran negara dalam merumuskan kebijakan budaya seringkali dipandang sebagai hegemoni negara atas masyarakat, dalam perspektif pemerintahan. Selain itu, penelitian terkait peran budaya dalam konstruksi pemberitaan di media massa telah dilakukan oleh Makki (2020).

Adapun penelitian terkait analisis kritis terhadap budaya dilihat dari dominasi komunikasi dilakukan oleh Scollo (2011). Termasuk studi mendalam oleh Fairclough (2014) tentang konstruksi media menggunakan metafora untuk mempertahankan dominasi ideologis dan kekuasaan. Penelitian ini juga sejalan dengan temuan oleh Van Dijk (2008), yang menunjukkan bahwa wacana di media tidak hanya mencerminkan realitas sosial tetapi juga memperkuat struktur kekuasaan tertentu.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, penulis belum menemukan kajian mengenai representasi budaya terhadap wacana publik dalam pemberitaan digital terkait isu-isu terkini, khususnya terkait wacana kebijakan pembentukan Kementerian Kebudayaan. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks interaksi antara media digital dan pembentukan identitas budaya di tengah perubahan kebijakan negara. Wacana publik terkait pembentukan Kementerian Kebudayaan dapat mencerminkan cara-cara tertentu dalam menyusun narasi budaya nasional, serta media digital dalam menyebarkan informasi, membentuk persepsi publik.

Penelitian ini dapat mengkaji representasi budaya dalam pemberitaan digital dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kebijakan budaya yang sedang dibentuk, baik dalam aspek positif maupun negatif, serta dampaknya terhadap kesadaran kolektif masyarakat terhadap identitas budaya nasional di era digital.

KERANGKA TEORI

Cultural Critical Discourse Analysis (CCDA)

Hubungan antara budaya dan wacana dalam bidang critical discourse analysis (CDA) dijelaskan oleh Gavriely, & Nuri (2018) sehingga menjadi konsep *Cultural critical discourse analysis* (CCDA) yaitu CCDA dipaparkan tidak hanya sebatas teoretis belaka tetapi suatu kerangka kerja, sebagai alat praktis yang dapat digunakan untuk menguraikan ‘muatan’ budaya yang tersirat dalam wacana. Pemikirannya memperkenalkan ‘Narasi Normalisasi’ dan ‘Narasi Keterasingan’. Narasi-narasi ini merupakan alat yang efisien dalam konstruksi budaya objek-objek sosial. Kemudian, terbentuk bagian dari Analisis Narasi Kritis atau *Critical Naratif Analysis* (CNA), yang merupakan alat CDA yang penting namun jarang digunakan. Salah satu topik yang erat sebagai objek kajian yaitu budaya minoritas dan mayoritas.

Gavriely & Nuri merangkum dari banyak pakar bahwa CCDA sebagai cabang dari CDA biasanya bertujuan untuk menjelaskan cara-cara wacana membantu menjaga keberlangsungan sosial dan kesenjangan politik, penyalahgunaan kekuasaan, dan pola dominasi. Oleh karena itu, salah satu pertanyaan inti teoretis dan empiris dalam CDA adalah “bagaimana pikiran manusia dapat ditipu, ditipu atau dimanipulasi melalui penggunaan bahasa”. Di sisi lain, Van Dijk berpendapat bahwa peneliti CDA seharusnya tidak tertarik hanya dalam menjelaskan beberapa sifat menarik dari retorika politik, tetapi juga dalam menjelaskannya. Untuk menjelaskannya, perlu menghubungkannya dengan representasi sosio-kognitif seperti sikap, norma, nilai, dan ideologi.

Budaya adalah sesuatu yang menempel dalam kehidupan manusia. Budaya lahir dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Budaya bersifat memenuhi kebutuhan komunitas itu sendiri (*self-sufficient*). Budaya adalah semua jenis aktivitas manusia dan hasilnya yang berpola, baik yang terinderai maupun yang tidak terinderai (Sadtono, 2002).

Sejalan dengan pendapat tersebut, budaya dapat dikelompokkan ke dalam dua pilahan besar, yakni budaya sebagai produk dan budaya sebagai keseluruhan cara hidup masyarakat. Sebagai produk, budaya di antaranya berwujud nilai-nilai, kepercayaan, norma-norma, simbol-simbol, dan ideologi, sedangkan sebagai cara hidup, budaya berupa hubungan antarmanusia dan sikap atau perilaku manusia dalam menjalin hubungan dengan sesamanya (Thompson, dalam Suyitno, 2015).

Untuk memahami budaya diperlukan pemahaman tentang bentuk paparan bahasa dan isi pesan yang diekspresikannya. Namun, karena ekspresi itu mengungkapkan kandungan mental penutur dan menjadi bagian dari konfigurasi sosial budaya masyarakat yang memiliki norma tertentu, pemahaman tentang corak budaya dan nilai-nilai budaya masyarakat juga sangat diperlukan dalam pemaknaan tuturan tersebut. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman perlu dilakukan analisis kritis terhadap budaya (*Cultural critical discourse analysis*).

Dalam kaitannya dengan bahasa sebagai praktik budaya, Duranti menjelaskan bahwa budaya (a) berbeda dengan nature, (b) sebagai pengetahuan, (c) sebagai komunikasi, (d) sebagai sistem mediasi, dan sebagai sistem praktik. Pembahasan budaya sebagai komunikasi berarti melihat budaya sebagai sistem tanda. Hal ini menjadi kajian teori semiotika budaya. Dalam hal ini, budaya dipandang sebagai ekspresi dunia, cara memberikan makna realitas melalui sejarah, mitos, deskripsi, teori, peribahasa, produk seni, dan kinerja seni. Dalam perspektif ini, produk budaya masyarakat, seperti mitos, ritual, klasifikasi dunia alami dan sosial dapat dipandang sebagai contoh keselarasan hidup manusia melalui kemampuannya untuk menentukan hubungan simbolik antarindividu, kelompok, atau spesies. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa pada hakikatnya budaya berkenaan dengan cara hidup manusia. Karena itu, budaya ini mencakup tiga wujud yang berkenaan dengan apa yang diperbuat oleh

manusia, apa yang diketahui atau dipikirkannya, dan apa yang dibuat atau digunakannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Suyitno, 2015).

Budaya tidak hanya sebagai produk, tetapi juga sikap atau nilai yang membentuk budaya hidup. Bentuk paparan dan penggunaan bahasa sebagai cerminan perilaku budaya dipengaruhi oleh situasi dan konteks yang membangun peristiwa berbahasa. Paparan dan penggunaan bahasa dalam situasi dan konteks masyarakat yang berbeda budayanya akan memiliki bentuk dan cara atau gaya penggunaan yang berbeda pula (Suyitno, 2015).

Pandangan analisis wacana kritis terhadap wacana budaya dipandang mengkaji tentang latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Kajian kewacanaan yang berhubungan hal itu meliputi topik, partisipan, waktu, dan tempat, saluran komunikasi, kode, situasi komunikasi, budaya atau adat istiadat berkomunikasi (Suparno dalam Jufri, 2009). Jika merujuk pada zaman sekarang maka saluran komunikasi terkait situasi komunikasi dan budaya yaitu melalui media digital seperti sosial media.

Strategi Normalisasi dan Keterasingan

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan budaya dalam analisis wacana kritis berdasarkan teori Gavriely & Nuri, yang mencakup dua strategi utama, yaitu strategi normalisasi dan keterasingan. Teori ini memungkinkan untuk menggali hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan representasi budaya dalam konteks wacana publik. Melalui strategi normalisasi, penelitian ini mengeksplorasi suatu fenomena atau kelompok dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan diterima dalam budaya dominan. Sementara itu, strategi keterasingan menyoroti kelompok tertentu, seperti kelompok minoritas, diposisikan secara terpinggirkan melalui narasi yang menjauhkan dan mengabstraksikan keberadaan mereka.

Strategi normalisasi (*strategies of normalization*) lahir dari konsep 'Narasi Normalisasi Perang' yang berarti seperangkat strategi yang bertujuan untuk mengaburkan

anomali dengan menciptakan kesalahpahaman bahwa anomali yang tercipta adalah peristiwa yang 'alami' atau 'normal' atau 'normal' bagi masyarakat tertentu. Tiga strategi utama telah diidentifikasi dalam mega strategi normalisasi: eufemisasi, naturalisasi, dan justifikasi. Eufemisasi bertujuan untuk mewarnai objek sosial dengan nada positif, baik dari segi penampilan, karakter, atau penilaiannya. Naturalisasi bertujuan untuk menampilkan objek sosial sebagai suatu kekuatan atau peristiwa yang tidak tergantung pada manusia, atau sebagai akibat yang tidak terhindarkan dari hukum alam, Justifikasi bertujuan untuk menggambarkan objek sosial sebagai sesuatu yang adil, rasional, dan layak untuk didukung.

Strategi keterasingan atau pengasingan (*strategies of estrangement*) adalah seperangkat strategi yang dimaksudkan untuk menciptakan keraguan terhadap konotasi positif yang biasanya diasosiasikan dengan konsep perdamaian. Lebih jelasnya adalah istilah yang mencerminkan penggunaan wacana atau retorika untuk menciptakan jarak antara tindakan atau kebijakan nyata dengan citra yang ingin dipertahankan atau diproyeksikan. Dalam konteks teks yang Anda berikan, istilah ini merujuk pada konstruksi pemerintah Israel mengelola kontradiksi antara klaim sebagai negara yang mencari perdamaian (*peace-seeking nation*) dengan tindakan-tindakan yang menunjukkan sebaliknya, seperti penolakan inisiatif perdamaian.

Strategi keterasingan dalam penelitian ini yang digunakan sebagai berikut.

a. Framing Wacana

Wacana "...terasa sekarang UU saja enggak cukup. Kita perlu lembaga yang lebih bertenaga untuk mengeksekusi apa yang tertera dalam UU itu " adalah teknik framing yang menunjukkan keterbukaan. Namun, narasi ini juga secara implisit mengalienasi pihak lain sebagai "tidak kooperatif" atau "tidak realistis".

b. Proyeksi Identitas

- Identitas tradisional: Israel sebagai negara kecil yang berusaha mencari perdamaian.

- Identitas baru: Israel sebagai pemenang perang dengan kebijakan keamanan tegas.
- Jarak identitas: Strategi *estrangement* menciptakan harmoni semu antara kedua identitas ini, memproyeksikan bahwa "kita mencari perdamaian, tetapi harus realistis dalam menghadapi ancaman."

c. Pengalihan Kritik

Strategi ini juga digunakan untuk menangkal kritik domestik dan internasional. Domestik menguatkan dukungan publik dengan memvalidasi kebijakan pemerintah sebagai wajar dan defensif. Adapun kritik internasional yaitu membingkai kegagalan perdamaian sebagai akibat dari faktor eksternal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode *Cultural Critical Discourse Analysis* (CCDA) berdasarkan teori Gavriely & Nuri. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang berisikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat bukan dalam bentuk angka (Semi, 1993:24). Data yang digunakan dalam penelitian berupa narasi pemberitaan pembentukan Kementerian Kebudayaan di media Kompas (2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berita-berita terkait topik penelitian dari media Kompas, baik versi cetak maupun daring, yang terbit selama periode pembentukan Kementerian Kebudayaan. Selain itu, dilakukan observasi teks secara mendalam terhadap narasi-narasi media yang relevan, serta studi pustaka untuk memperkuat konteks wacana dan kerangka analisis.

Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: *pertama*, mengidentifikasi strategi normalisasi, seperti eufemisasi, naturalisasi, dan justifikasi, dalam narasi yang dibangun. *Kedua*, menganalisis strategi keterasingan yang mencakup framing wacana, proyeksi

identitas, dan pengalihan kritik. *Ketiga*, menginterpretasikan temuan dari penelitian untuk memahami bahasa digunakan untuk membentuk representasi kelompok minoritas dalam konteks budaya dan kekuasaan. Teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta refleksi kritis terhadap interpretasi peneliti.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi normalisasi dan keterasingan diterapkan dalam wacana publik, khususnya dalam konteks pernyataan atau tindakan pemberitaan terhadap wacana pembentukan kementerian kebudayaan.

Penerapan Strategi Normalisasi

a. Eufemisasi

Eufemisasi yang terdapat pada penelitian ini dapat dilihat pada data berikut.

Data 1

"Pekerjaan kita akan semakin berdaya ketika ada lembaga khusus (kementerian), bukan setingkat ditjen (direktorat jenderal). (Kompas, 1/10/24).

Berdasarkan data (1), menunjukkan eufemisasi penggunaan frasa "pekerjaan kita akan semakin berdaya" berfungsi untuk memberikan konotasi positif pada gagasan pembentukan kementerian kebudayaan. Istilah "berdaya" mengimplikasikan bahwa pembentukan kementerian akan meningkatkan efektivitas dan kemampuan lembaga dalam mengelola kebudayaan, yang tampak lebih positif daripada pengelolaan kebudayaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen). Dengan menggunakan kata ini, penulis berusaha menyampaikan bahwa kebudayaan perlu diberdayakan lebih lanjut dan kementerian adalah jalan yang tepat untuk itu.

Data 2.

"Kebudayaan sebagai ketahanan nasional adalah salah satu hal yang fundamental yang penting untuk bisa dilihat sebagai diplomasi budaya seperti apa yang harus dilakukan Indonesia ketika kementerian kebudayaan ini terwujud. (Kompas, 1/10/24).

Berdasarkan data (2), pernyataan ini mengandung eufemisasi melalui frasa "kebudayaan sebagai ketahanan nasional" memberikan konotasi positif terhadap kebudayaan sebagai bagian integral dari identitas dan kekuatan negara. Ini memposisikan kebudayaan dalam konteks yang sangat penting untuk kelangsungan dan ketahanan negara, yang menciptakan gambaran positif terhadap kebudayaan yang dikelola oleh kementerian. Dengan demikian, ada usaha untuk melegitimasi dan memberikan bobot pada pembentukan kementerian kebudayaan sebagai langkah penting untuk ketahanan nasional.

Data 3,
"Kita sudah punya UU Pemajuan Kebudayaan sejak 2017. Namun, terasa sekarang UU saja enggak cukup. Kita perlu lembaga yang lebih bertenaga untuk mengeksekusi apa yang tertera dalam UU itu." (Kompas, 1/10/2024)

Berdasarkan data (3), frasa "lembaga yang lebih bertenaga" merupakan eufemisasi yang menyiratkan kebutuhan akan institusi yang memiliki kapasitas dan otoritas lebih besar dalam mengimplementasikan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Penggunaan istilah ini memberikan kesan bahwa lembaga saat ini kurang memadai, tanpa secara langsung menyatakan kelemahan tersebut. Eufemisasi ini berfungsi untuk mendukung argumen bahwa pembentukan kementerian khusus akan memberikan kekuatan tambahan dalam pelaksanaan kebijakan kebudayaan.

Data 4,
"Kebudayaan sebagai ketahanan nasional adalah salah satu hal yang fundamental yang penting untuk bisa dilihat sebagai diplomasi budaya seperti apa yang harus dilakukan Indonesia ketika kementerian kebudayaan ini terwujud." (Kompas, 1/10/2024)

Berdasarkan data (4), frasa "kebudayaan sebagai ketahanan nasional" merupakan eufemisasi yang mengangkat peran strategis budaya dalam konteks pertahanan negara. Penggunaan istilah ini memberikan legitimasi terhadap pentingnya

pembentukan kementerian kebudayaan, dengan menyiratkan bahwa budaya memiliki peran vital dalam menjaga keutuhan dan identitas nasional. Eufemisasi ini berfungsi untuk memperkuat argumen bahwa kementerian kebudayaan bukan hanya penting untuk pelestarian budaya, tetapi juga untuk kepentingan nasional yang lebih luas.

b. Naturalisasi

Beberapa tindakan yang pada dasarnya bisa dipertanyakan secara etis, seperti penggunaan kekuatan militer atau tindakan represif lainnya, dipresentasikan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan dan bagian dari hukum alam atau situasi geopolitik yang lebih besar. Hal ini digunakan untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip perdamaian atau keadilan.

Data 5.
"Terlalu lama kita mengabaikan kebudayaan. Potensinya besar, dari dulu itu sudah diakui. Sekarang bagaimana itu bisa dioptimalkan." (Kompas, 1/10/24).

Berdasarkan data (5), pernyataan ini menyarankan bahwa kebudayaan sudah lama diakui sebagai sesuatu yang penting, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal. Kalimat ini secara implisit mencoba menormalkan keadaan ini dengan menjelaskan bahwa kebudayaan "terlalu lama diabaikan", sehingga upaya untuk mengoptimalkan kebudayaan menjadi tampak wajar dan alami. Dalam konteks ini, naturalisasi digunakan untuk menyatakan bahwa sudah seharusnya kebudayaan mendapatkan perhatian lebih melalui pembentukan kementerian yang dapat mengelola dan mengembangkan potensi tersebut dengan lebih baik.

Data 6.
"Sekarang bagaimana itu bisa dioptimalkan." (Kompas, 1/10/24).

Berdasarkan data (6), kalimat ini menegaskan bahwa upaya pengoptimalan kebudayaan adalah hal yang harus dilakukan

secara alami dan rasional. Ini berfungsi untuk memperkuat argumentasi bahwa pemisahan kebudayaan menjadi kementerian adalah langkah yang tepat dan harus dilakukan untuk memastikan kebudayaan mendapat perhatian yang seharusnya.

c. Justifikasi

Dalam banyak kasus, kebijakan yang kontroversial dibenarkan dengan klaim bahwa kebijakan tersebut adalah pilihan yang rasional dan sah, dengan alasan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan negara atau kelompok dominan. Ini menciptakan citra bahwa kebijakan tersebut bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga moral dan etis.

Data 7.

"Kementerian khusus diperlukan untuk mengoptimalkan potensi itu. Bukan cuma dalam pengelolaan anggaran, melainkan juga mengefektifkan kerja-kerja pemajuan kebudayaan yang meliputi empat langkah strategis, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan." (Kompas, 1/10/24).

Berdasarkan data (7), kalimat ini menggunakan justifikasi untuk menggambarkan bahwa pembentukan kementerian khusus adalah langkah yang adil, rasional, dan diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan kebudayaan di Indonesia. Merujuk pada langkah-langkah strategis seperti perlindungan dan pengembangan, yang dianggap perlu dilakukan dengan lebih efektif, penulis memberi alasan yang kuat untuk mendukung pembentukan kementerian. Dengan kata lain, kebijakan ini dibenarkan dan diargumenkan sebagai sesuatu yang layak didukung.

Penerapan Strategi Keterasingan

a. Framing Wacana

Framing digunakan untuk menciptakan kesan bahwa pihak atau kelompok yang dipandang sebagai lawan atau penentang tidak kooperatif atau tidak realistis. Misalnya, dalam narasi perdamaian, pihak yang menentang kebijakan dominan digambarkan sebagai pihak yang menutup diri terhadap dialog atau

sebagai pihak yang tidak serius dalam mencari perdamaian. Dengan cara ini, citra negatif diciptakan terhadap mereka yang tidak setuju dengan kebijakan atau posisi dominan.

Framing wacana adalah strategi yang digunakan untuk membingkai suatu isu dengan cara tertentu agar memengaruhi cara pandang audiens terhadap isu tersebut. Dalam wacana pembentukan kementerian kebudayaan, framing dapat dilihat pada kalimat berikut.

Data 8.

"Pekerjaan kita akan semakin berdaya ketika ada lembaga khusus (kementerian), bukan setingkat ditjen (direktorat jenderal)." (Kompas, 1/10/24).

Berdasarkan data (8), menunjukkan framing yang menciptakan gambaran bahwa pembentukan kementerian kebudayaan sebagai lembaga yang lebih kuat dan efektif sangat dibutuhkan. Dengan menyebutkan "lembaga khusus (kementerian)" dan membandingkannya dengan Direktorat Jenderal yang lebih rendah tingkatannya, penulis berusaha untuk memperkuat citra bahwa kebudayaan yang dikelola di bawah kementerian akan memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dan berdaya. Ini memberikan kesan bahwa kebudayaan yang terpisah dari kementerian sebelumnya tidak cukup dihargai dan dioptimalkan, sedangkan kementerian akan mengoptimalkan potensi kebudayaan secara maksimal. Framing ini mengarahkan audiens untuk melihat kementerian sebagai satu-satunya solusi yang tepat untuk pemajuan kebudayaan.

Data 9.

"Kementerian khusus diperlukan untuk mengoptimalkan potensi itu. Bukan cuma dalam pengelolaan anggaran, melainkan juga mengefektifkan kerja-kerja pemajuan kebudayaan yang meliputi empat langkah strategis, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan." (Kompas, 1/10/24).

Berdasarkan data (9), kalimat ini menunjukkan framing yang menciptakan kesan bahwa tanpa kementerian, potensi kebudayaan tidak bisa dioptimalkan.

Pembentukan kementerian dianggap sebagai cara yang sangat efektif untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan, yang mencakup langkah-langkah strategis. Kalimat ini mengarahkan audiens untuk mempersepsikan kementerian sebagai pendorong utama dalam melaksanakan tugas-tugas ini, dan menggambarkan bahwa tanpa kementerian khusus, langkah-langkah tersebut tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

b. Proyeksi Identitas

Terdapat dualitas identitas yang dibangun untuk menggambarkan kelompok dominan dalam dua cara yang saling bertentangan. Di satu sisi, kelompok ini digambarkan sebagai pihak yang berusaha keras mencari perdamaian, namun di sisi lain, mereka juga digambarkan sebagai pemenang perang yang membutuhkan kebijakan keamanan keras. Proyeksi identitas ini berfungsi untuk menciptakan gambaran semu tentang negara atau kelompok tersebut, yang tampaknya berdamai tetapi sebenarnya mengejar kebijakan yang tidak sejalan dengan klaim tersebut.

Data 10.

"Kebudayaan sebagai ketahanan nasional adalah salah satu hal yang fundamental yang penting untuk bisa dilihat sebagai diplomasi budaya seperti apa yang harus dilakukan Indonesia ketika kementerian kebudayaan ini terwujud." (Kompas, 1/10/24).

Berdasarkan data (10), proyeksi identitas yang digunakan di sini adalah identitas kebudayaan Indonesia sebagai elemen penting dalam ketahanan nasional dan diplomasi budaya. Pembentukan kementerian kebudayaan dijelaskan sebagai langkah untuk memperkuat identitas nasional Indonesia melalui kebudayaan yang dapat memainkan peran kunci dalam diplomasi internasional. Hal ini menggambarkan kebudayaan Indonesia sebagai pilar yang kuat dan vital bagi negara, seolah-olah negara Indonesia harus dikenal dan dipandang sebagai bangsa yang kokoh karena budaya yang dimilikinya. Dengan cara ini, proyeksi identitas kebudayaan dihubungkan dengan tujuan

negara yang lebih besar dan lebih global, yaitu ketahanan nasional dan diplomasi budaya.

c. Pengalihan Kritik

Pengalihan kritik digunakan untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan atau ketidaksempurnaan kebijakan yang dijalankan. Kritik domestik dijawab dengan menggambarkan kebijakan tersebut sebagai sah dan defensif, sementara kritik internasional dibingkai sebagai akibat dari intervensi eksternal atau faktor luar yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, tanggung jawab atas kegagalan kebijakan tidak diambil oleh pihak yang menjalankan kebijakan tersebut.

Data 11.

"Sekarang bagaimana itu bisa dioptimalkan." (Kompas, 1/10/24).

Berdasarkan data (11), kalimat ini mengalihkan perhatian dari kelemahan sistem yang ada sebelumnya, yaitu pengelolaan kebudayaan yang tidak optimal, ke fokus baru tentang kebudayaan dapat "dioptimalkan". Dengan menyebutkan kata "optimalkan", kalimat ini secara tidak langsung mengalihkan kritik terhadap kegagalan atau kurangnya perhatian terhadap kebudayaan pada masa sebelumnya, dan menggantinya dengan solusi yang lebih diterima, yaitu pembentukan kementerian. Fokus pada "bagaimana itu bisa dioptimalkan" menghindari pembahasan lebih jauh mengenai kesalahan atau kekurangan sistem lama, dan mengarahkan audiens untuk berpikir tentang potensi masa depan yang lebih cerah.

Data 12.

"Kita sudah punya UU Pemajuan Kebudayaan sejak 2017. Namun, terasa sekarang UU saja enggak cukup. Kita perlu lembaga yang lebih bertenaga untuk mengeksekusi apa yang tertera dalam UU itu." (Kompas, 1/10/24).

Berdasarkan data (12), kalimat ini, pengalihan kritik terjadi dengan menyatakan bahwa meskipun sudah ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, tetapi pelaksanaannya tidak efektif karena tidak ada lembaga yang cukup kuat untuk mengeksekusi isi UU

tersebut. Kalimat ini mengalihkan kritik terhadap kurangnya implementasi UU pada lembaga yang ada saat ini (Ditjen Kebudayaan) dan menyarankan bahwa pembentukan kementerian adalah solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Ini menciptakan narasi bahwa meskipun ada peraturan yang sudah ada, tanpa kementerian, kebudayaan tidak bisa berkembang dengan optimal.

Pembahasan

Representasi Budaya dalam Wacana Pembentukan Kementerian Kebudayaan melalui Pendekatan Cultural Critical Discourse Analysis (CCDA)

Penelitian ini mengkaji representasi budaya dalam wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan dengan menggunakan pendekatan Cultural Critical Discourse Analysis (CCDA) yang dikembangkan oleh Gavriel dan Nuri. Pendekatan ini merupakan pengembangan dari model Critical Discourse Analysis (CDA) yang difokuskan pada dinamika kultural dalam produksi wacana. Pendekatan ini menjadi kebaruan dalam kajian kebudayaan di Indonesia, karena menekankan relasi antara bahasa, kekuasaan, dan identitas budaya dalam konteks kebijakan negara.

CDA dalam konteks ini digunakan untuk memahami representasi kebudayaan disusun dalam wacana pembentukan kementerian kebudayaan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Teori CCDA yang dikembangkan oleh Gavriel dan Nuri berfokus pada aspek-aspek berikut dalam analisis teks: konstruksi identitas budaya, hegemoni dalam representasi budaya, peran penguasa dalam mengendalikan narasi budaya, dan pengaruh diskursus terhadap perubahan sosial.

Sebagian besar studi sebelumnya mengenai wacana kebudayaan (misalnya, Susanto, 2017; Wulandari, 2020) hanya menggunakan pendekatan semiotik atau strukturalis yang kurang menyoroti dimensi kekuasaan dalam pembentukan wacana budaya. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam ranah studi kebudayaan, khususnya dalam konteks

kebijakan budaya di Indonesia. Hasil temuan didasarkan pada teori CCDA dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.
Ringkasan Strategi (*Cultural Critical Discourse Analysis*)

Kategori	Strategi	Kutipan Kunci	Fungsi
Normalisasi	Eufemisasi	"Pekerjaan kita akan semakin berdaya [...]"	Memberi kesan positif terhadap kementerian
Normalisasi	Naturalisasi	"Terlalu lama kita mengabaikan kebudayaan [...]"	Menampilkan pembentuk kementerian sebagai kebutuhan alami
Normalisasi	Justifikasi	"Kementerian khusus diperlukan [...] mengefektifkan [...]"	Menyediakan alasan logis dan etis
Keterasingan	Framing	"Bukan setingkat ditjen [...]"	Membentuk persepsi superioritas kementerian
Keterasingan	Proyek identitas	"Kebudayaan sebagai ketahanan nasional [...]"	Membentuk identitas nasional yang kuat
Keterasingan	Pengalihan kritik	"Sekarang bagaimana itu bisa dioptimalkan."	Menghindari pembahasan kegagalan masa lalu

Konstruksi Identitas Budaya

a. Penggambaran Kebudayaan sebagai Keutuhan Nasional

Wacana mengenai pembentukan kementerian kebudayaan mencerminkan konstruksi identitas budaya yang berhubungan erat dengan identitas nasional. Dalam pernyataan yang terdapat dalam wacana (misalnya, "kebudayaan sebagai ketahanan nasional" dan "kebudayaan untuk diplomasi budaya" dalam Data 7 dan 8), kebudayaan

Indonesia diposisikan sebagai elemen penting dalam membangun identitas nasional yang kuat dan berdaulat. Identitas budaya yang diproyeksikan adalah identitas yang mengutamakan nilai-nilai yang berkaitan dengan ketahanan nasional dan diplomasi internasional.

Pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa kebudayaan bukan hanya aspek internal yang berharga untuk negara, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mewakili negara di dunia internasional (Purwanto, 2022). Akinci (2020) mengungkapkan bahwa seseorang yang terikat dengan budayanya akan menjadi identitas dimana pun keberadaannya. Identitas budaya dalam wacana ini dibentuk untuk mengaitkan kebudayaan dengan aspirasi negara yang lebih besar, yaitu ketahanan dan peran dalam hubungan internasional. Identitas budaya yang menjadi salah satu bentuk dari identitas suatu negara menjadi satu dorongan untuk terus dilestarikan dan diperhatikan (Ismadi, 2014). Secara etimologis, istilah “identitas nasional” berasal dari kata bahasa Inggris “identity” yang mengacu pada ciri-ciri, tanda-tanda atau identitas yang berkaitan dengan sesuatu atau benda yang membedakannya dengan yang lain. Kepribadian publik suatu negara mempunyai kualitas, atribut, dan keunikan tersendiri yang tidak seluruhnya ditentukan oleh unsur-unsur pendukungnya (Hasan & Muharroh, 2024).

b. Kebudayaan sebagai Subjek Politik dalam kerangka CDA

Kebudayaan sering kali diposisikan sebagai subjek yang aktif dalam proses politik, bukan sekadar objek yang pasif. Dalam hal ini, kebudayaan diwakili sebagai kekuatan yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Representasi ini tercermin dalam wacana yang mengangkat kebudayaan sebagai bidang yang perlu dikelola lebih strategis melalui pembentukan kementerian. Narasi ini menunjukkan kebudayaan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari warisan, tetapi sebagai bagian dari kekuatan politik yang memiliki peran dalam

pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pureklolon (2021) bahwa budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota suatu sistem politik. Budaya politik mencakup simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan situasi di mana tindakan politik dilakukan.

Hegemoni dalam Representasi Budaya

a. Dominasi Pengelolaan Kebudayaan oleh Negara

Hegemoni dalam konteks wacana ini terkait dengan cara negara, dalam hal ini melalui pembentukan kementerian kebudayaan, mengontrol dan mengatur representasi budaya nasional. Wacana mengenai pembentukan kementerian kebudayaan mengisyaratkan bahwa kebudayaan yang sebelumnya diatur oleh Ditjen Kebudayaan atau lembaga lainnya tidak cukup efektif untuk mengelola kebudayaan secara nasional. Dengan pembentukan kementerian baru, negara berusaha memperkuat kekuasaannya dalam mengelola dan merepresentasikan kebudayaan yang sesuai dengan nilai-nilai nasional yang diinginkan oleh pemerintah.

Gavriel dan Nuri menyoroti diskursus budaya dapat menguatkan posisi dominan negara dalam menentukan apa yang dianggap sebagai budaya yang sah dan diakui. Pembentukan kementerian ini, dengan mengedepankan alasan seperti ketahanan nasional dan diplomasi budaya, merupakan upaya untuk mengonsolidasikan posisi negara sebagai otoritas utama dalam pembentukan dan pengelolaan kebudayaan.

b. Penghilangan Suara Minoritas dalam Representasi Budaya

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam wacana ini adalah potensi penghilangan atau marginalisasi suara kelompok budaya minoritas. Ketika kebudayaan nasional diwakili melalui kementerian baru yang dikelola oleh pemerintah pusat, terdapat risiko bahwa suara-

suara budaya yang tidak sesuai dengan narasi dominan negara akan terpinggirkan. Dengan pembentukan kementerian kebudayaan yang berfokus pada ketahanan nasional, ada kemungkinan bahwa budaya yang tidak sejalan dengan ideologi negara atau yang dianggap tidak “representatif” bagi kebudayaan nasional akan diabaikan.

Pengaruh Diskursus terhadap Perubahan Sosial

a. Pembentukan Normalitas Baru dalam Pengelolaan Kebudayaan

Wacana mengenai pembentukan kementerian kebudayaan membentuk suatu narasi baru yang menggambarkan bahwa pengelolaan kebudayaan yang lebih terstruktur dan terorganisir adalah hal yang “normal” dan wajar dilakukan oleh negara (Anshori et.al, 2021). Dalam konteks fungsi, media massa saat ini tidak lagi sekedar menjalankan fungsi konvensional sebagai sarana informasi, pendidikan, dan hiburan (seperti dipahami oleh pendekatan liberal-pluralis), namun media massa teridentifikasi juga melakukan fungsi yang kian meluas dan *indepth*, seperti fungsi: pengawasan (*surveillance*), penafsiran (*interpretation*), pertalian (*linkage*), penyebaran nilai-nilai (*transmission of value*), sumber dan pengendali informasi dominan, pemasok budaya (Launa & Hayu : 2020).

Dalam hal ini, diskursus yang dibangun untuk mendukung pembentukan kementerian berfungsi untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai pengelolaan kebudayaan (Fajri, 2025). Sebelumnya, kebudayaan dipandang sebagai bagian dari kewenangan Direktorat Jenderal Kebudayaan, tetapi kini dihadirkan dalam wacana sebagai masalah yang lebih besar yang membutuhkan kementerian yang lebih kuat untuk menangani berbagai aspek kebudayaan Indonesia.

Pernyataan mengenai “optimalisasi kebudayaan” dan “pembentukan kementerian sebagai solusi” (Data 5 dan 6) menggambarkan bahwa masyarakat dipandu untuk menerima perubahan dalam pengelolaan kebudayaan ini sebagai langkah

yang rasional dan perlu dilakukan demi kemajuan kebudayaan Indonesia.

Selain itu, diskursus ini juga mencerminkan pergeseran pandangan terhadap nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahyudi et al. (2023), pergeseran nilai sosial budaya dapat terjadi akibat pengaruh kebudayaan, yang memicu perubahan dalam cara masyarakat memandang dan mengelola aspek-aspek budaya mereka. Dalam hal ini, wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan dapat dilihat sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengakomodasi perubahan nilai-nilai budaya dalam masyarakat, serta sebagai upaya untuk memperkuat identitas budaya nasional melalui institusi yang lebih fokus dan terstruktur.

b. Penguatan Peran Negara dalam Kebijakan Budaya

Menurut teori CCDA Gavriel dan Nuri, peran negara dalam mempengaruhi perubahan sosial menjadi hal yang signifikan. Pembentukan kementerian kebudayaan tidak hanya berdampak pada kebijakan administratif, tetapi juga pada perubahan sosial yang lebih besar terkait pengelolaan kebudayaan. Negara, melalui pembentukan kementerian, memperkuat posisinya dalam menentukan agenda kebudayaan nasional. Dengan memfasilitasi kebudayaan sebagai sarana diplomasi dan ketahanan nasional, negara memperkenalkan kebijakan budaya yang mendukung tujuan-tujuan negara dan mengintegrasikan kebudayaan dalam strategi pembangunan sosial dan ekonomi.

Budaya juga kerap dimasifikasi oleh media, dan dijadikan sebagai konten untuk menghasilkan keuntungan besar oleh para kapitalis media (Permana & Alam, 2022). Menurut Pamungkas, Moefad, & Purwono (2024) konstruksi realitas sosial adalah proses dinamis yang melibatkan berbagai aktor sosial, termasuk media massa dan media sosial, yang memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik. Salah satu persepsi yang dapat dibentuk yaitu tentang budaya dan negara. Adapun Menurut Riyanto (2020), konstruksi identitas nasional di

Indonesia sangat dipengaruhi oleh media massa, yang sering kali memfasilitasi narasi persatuan dan kesatuan melalui kampanye yang mengedepankan pentingnya identitas bangsa.

PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa strategi normalisasi tampak melalui eufemisasi seperti “berdaya” dan “ketahanan nasional” untuk membangun citra positif dan urgensi. Naturalisasi dan justifikasi memperkuat anggapan bahwa pembentukan kementerian adalah langkah wajar dan sah demi kemajuan kebudayaan.

Sementara itu, strategi keterasingan terlihat dari framing yang menyudutkan lembaga saat ini dan menampilkan kementerian sebagai solusi ideal. Proyeksi identitas digunakan untuk menunjukkan bahwa kementerian kebudayaan mencerminkan komitmen nasional terhadap budaya sebagai kekuatan strategis.

Temuan penelitian mengungkap bahwa narasi pembentukan Kementerian Kebudayaan mencerminkan kompleksitas politik dan budaya dalam konstruksi identitas nasional, sekaligus memperlihatkan peran penting media dalam pembentukan opini publik. Berdasarkan hal ini, guru dan pihak sekolah dapat memanfaatkan isu tersebut sebagai materi pembelajaran berbasis isu aktual untuk mendorong pengembangan literasi kritis. Kajian lanjutan selanjutnya dapat dilakukan dengan menganalisis framing media antara media massa dan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Akinci, I. (2020). Culture in the ‘politics of identity’: conceptions of national identity and citizenship among second-generation non-Gulf Arab migrants in Dubai. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 46(11), 2309–2325.
<https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1583095>

Anwar, C. (2024). Pendidikan dan Kebudayaan : Analisis Integratif dan

Komprehensif. *Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Barat*, 1–4.

Anshori, A., Rudianto, R., Adhani, A., & Nasution, N. (2021). Pengaruh Relasi Budaya dalam Pesan dan Saluran Politik terhadap Sikap Pemilih: Studi Kasus di Pilkada Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, 22(2), 177-188.
<https://doi.org/10.31346/jpikom.v22i2.3399>

Baga, M. (2022). Dekonstruksi Derrida dan Hegemoni Gramsci: Sebuah Awal Pencarian Identitas Budaya Indonesia Pascakolonial. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 49-63.
<https://doi.org/10.54923/researchreview.v1i1.10>

Fajri, Akmal. (2025). "Rhetorical Study of Ideological Representation in Public Discourse: A Critical Analysis of Socio-Cultural Discourse: Studi Retorika Atas Representasi Ideologi Dalam Wacana Masyarakat: Analisis Kritis Terhadap Diskursus Sosial Budaya." *ARSALINGUA: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 1(1), 61-71.
<https://journal.pusakacendekia.org/index.php/arsa/article/view/6>

Fisip, R. (2024). Pemisahan Kementerian: Strategi Memajukan Kebudayaan Indonesia. Diakses dari *Fisip.Unair.Ac.Id*.
https://fisip.unair.ac.id/blog/2024/10/25/fisip-statement-pemisahan-kementerian-strategi-memajukan-kebudayaan-indonesia/?utm_source=chatgpt.com

Gavriely, Dalia ., N. (2018). Cultural approach to CDA (CCDA): From theory to practice. *The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies*.

Hasan, A., & Muharroh, Z. (2024). Krisis Identitas Nasional Pada Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6), 793–800.

- <https://sejurnal.com/1/index.php/jimt/article/view/2980>
- Ismadi, H. D. (2014). Pemikiran dan Wacana Ketahanan Budaya. In *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Ismail, H. Z. (2019). Eufemisasi dan Sensorisasi dalam Wacana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 serta Relevansinya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. (*Doctoral dissertation*) Universitas Negeri Makassa.
- Fairclough, N. (2014). *Language and Power*. Routledge. <https://doi.org/10.1075/intp.00099.cam>
- Jufri. (2009). *Analisis Wacana Budaya*. Makassar: Penerbit UNM.
- Launa, L., & Hayu Lusianawati, H. (2020). Diskursus Ideologi Media: Dari Perspektif Liberal-Pluralis Hingga Post-Strukturalis.
- Makki, M. (2020). The role of 'culture' in the construction of news values: a discourse analysis of Iranian hard news reports. *Journal of Multicultural Discourses*, 308–324. <https://doi.org/10.1080/17447143.2020.1786573>
- Mawikere, M. C. S., Hura, S., Mawikere, J. C. R., & Mawikere, M. D. B. (2024). Budaya dalam multi perspektif: Diskursus dan komponen-komponennya. *PADAMARA: Jurnal Psikologi dan Sosial Budaya*, 1(1), 10-24. <https://doi.org/10.70420/qhj82966>
- Muhammad, M. (2019). Eufemisme Berbahasa di dalam Surat Kabar. *Lingue: Jurnal Bahasa, Budaya, dan Sastra*, 1(1), 36-53. <https://doi.org/10.33477/lingue.v1i1.1177>
- Mulyasari, T., Burhanuddin, B., & Sirulhaq, A. (2022). Penggunaan Eufemisme dalam Harian Kompas Rubrik Politik dan Hukum: The Use of Euphemisms in Kompas Daily Political and Legal Rubric. *Jurnal Bastrindo*, 3(1), 80-88. <https://doi.org/10.29303/jb.v3i1.374>
- Pahlevi, A. F. (2018). Hegemoni Harian Fajar Menjelang PILPRES 2019 (Studi Analisis Wacana Kritis, Norman Fairclough). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/AI-Khitabah/article/view/6956>
- Pamungkas, Y. C., Moefad, A. M., & Purnomo, R. (2024). Konstruksi Realitas Sosial di Indonesia dalam Peran Media dan Identitas Budaya di Era Globalisasi. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(4), 28-36. <https://doi.org/10.37329/metta.v4i4.3737>
- Permana, R. S. M., & Alam, P. W. (2022). Ekonomi Politik Media Dalam Perspektif Komunikasi Dan Sosial-Budaya: Ekonomi Politik Media Dalam Perspektif Komunikasi Dan Sosial-Budaya. *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora*, 4(2), 238-243. <https://doi.org/10.61296/jkbh.v4i2.19>
- Pureklolon, T. T. (2021). Eksistensi Budaya Politik Di Indonesia: Sebuah Kajian. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 3(1), 405-430. <https://dx.doi.org/10.56985/jc.v3i1.147>
- Purwanto, S. A. (2022). Cultural Policy: Some initiatives and trends to manage cultural diversity in Indonesia. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 7(2), 245–254. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v7i2.24827>
- Rafiee, A., Spooren, W., & Sanders, J. (2023). Framing similar issues differently: a cross-cultural discourse analysis of news images. *Social Semiotics*, 33(3), 515–538. <https://doi.org/10.1080/10350330.2021.1900719>
- Rahman, R. D., Prasajo, N. J., Baya, A. M., Dira, M. A., Ningsih, N. W., &

- Ghozali, I. (2024). Media Sosial Terhadap Konstruksi Identitas Nasional dan Kesadaran Kewarganegaraan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 213-222. <https://doi.org/10.3342/jkepmas.v1i3.136>
- Scollo, M. (2011). Cultural approaches to discourse analysis: A theoretical and methodological conversation with special focus on Donal Carbaugh's cultural discourse theory. *Journal of Multicultural Discourses*, 6(1), 1–32. <https://doi.org/10.1080/17447143.2010.536550>
- Semi, A. (1993). *Metode Penelitian Sastra*. Angkasa. <https://doi.org/10.59562/indonesia.v5i2.61356>
- Setyowati, A. (2024). Memisahkan Kementerian Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Pakuan*.
- Sinaga, T. M. (2024). Wacana Pembentukan Kementerian Kebudayaan Menguat. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/10/01/wacana-pembentukan-kementerian-kebudayaan-menguat?>
- Sukma, B. P. (2021). Constructing and promoting national identity through tourism: A multimodal discourse analysis of Indonesian official tourism website. *Linguistik Indonesia*, 39(1), 63-77. <https://doi.org/10.26499/li.v39i1.197>
- Suharyo, Surono, A. (2015). Representasi Ideologi Dan Kekuasaan Dalam Bahasa: Kajian Teks Media. *Humanika*, 22(2), 92. <https://doi.org/10.14710/humanika.22.2.92-102>
- Supriadi, I., & Sari, Y. (2024). Indonesian Cultural Identity In Social Media Networks: A Critical Discourse Analysis On Instagram Of Gen Z Users. *MSJ: Majority Science Journal*, 2(1), 171-177. <https://doi.org/10.61942/msj.v2i1.76>
- Suyitno, I. (2015). *Analisis Wacana Budaya (Refleksi Budaya Etnik Dalam Kosakata Wacana)*. Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and Power*. Macmillan Education UK. <https://doi.org/10.1007/978-1-137-07299-3>
- Wahyudi, S. I., Sukiman, S., & Sukenti, K. (2023). Pergeseran Pandangan terhadap Nilai Sosial Budaya dalam Masyarakat sebagai Akibat Pengaruh Kebudayaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(1), 45–60. <https://ejournal.unipma.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/553/491>
- Yunanto, F., Sy, E. N. S. A., & Kasanova, R. (2024). Political Discourse In Media Space: A Critical Discourse Perspective In Indonesia. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 325-330. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1262>
- Yusuf, A. M. (2017). Assituruseng: Hegemoni Budaya dalam Praktik Politik dan Kekuasaan di Belawa. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 2(1), 74-94. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v2i1.2956>
- Zainuddin, I., Darwis, M., & Iswary, E. (2021). Representasi Ideologi di Balik Wacana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 Dalam Media Kompas: Tinjauan Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Ilmu Budaya*, 9(2), 133–143. <https://doi.org/10.34050/jib.v9i2.14696>